

ABSTRAK

KELEMAHAN DALAM UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH YANG MENGATUR PEMILUKADA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KONFLIK PENYELENGGARAAN PEMILUKADA (Studi Konflik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Periode 2014- 2019 di Provinsi Lampung)”

oleh

RENI OKTAULI PANJAITAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan yang menimbulkan masalah yang terdapat dalam undang-undang pemilukada khususnya pemilihan Gubernur Periode 2014-2019 di provinsi Lampung dan Untuk memberikan gambaran bagaimana solusi penyelesaian konflik dalam rencana penyelenggaraan pemilihan Gubernur Periode 2014-2019 di Provinsi Lampung. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara Normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dengan skripsi ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Setelah data tersebut terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan tahap-tahap mengidentifikasi, sistematis atau mengklarifikasikan, interpretasi data dan menilai data. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa kelemahan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang pemilukada menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya yang berakibat konflik seperti adanya multitafsir dalam pasal penyelenggaraan pemilukada pasal 86 dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan besarnya biaya pemilukada yang berakibat adanya penundaan pemilukada di Provinsi Lampung.

Solusi untuk mengatasi kelemahan yang terjadi yaitu harus adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas agar tidak mengandung multitafsir dan melakukan

efisiensi pengadaan logistik dalam pelaksanaan pemilukada untuk mencegah biaya pemilukada yang sangat tinggi.

Kata kunci: *Pemerintah Daerah, Kelemahan Pemilukada, Solusi Kelemahan Pemilukada*